



PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk

**LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL
31 MARET 2019
(TIDAK DIAUDIT)**

PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk

DAFTAR ISI

	<u>HALAMAN</u>
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	1
LAPORAN POSISI KEUANGAN	2
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF	3
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	4
LAPORAN ARUS KAS	5
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	6 - 32

----- 000 -----



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT PERDANA KARYA PERKASA TBK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2019**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ir. Soerjadi Soedarsono
Alamat kantor : Jl. Sentosa 56 Samarinda
Alamat domisili : Perumahan Bumi Sempaja Blok EA 85/87 RT. 46.Samarinda
Nomor telepon : 0541 - 771290
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Dr. Untung Haryono
Alamat kantor : Jl. Sentosa 56 Samarinda
Alamat domisili : Perum Remaja Permai Blok A No. 39 Samarinda
Nomor telepon : 0541 - 771290
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Perdana Karya Perkasa Tbk;
2. Laporan keuangan PT Perdana Karya Perkasa Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Perdana Karya Perkasa Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan PT Perdana Karya Perkasa Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Perdana Karya Perkasa Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi
Samarinda, 30 April 2019

Soerjadi Soedarsono
Direktur Utama

Untung Haryono
Direktur

PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk

LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 Maret 2019

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31-Mar-19	31-Dec-18
ASET			
Aset lancar			
Kas dan setara kas	5	1,137,001	1,403,521
Piutang usaha	6,16	8,988,622	5,856,848
Piutang retensi	7	-	-
Piutang lain-lain	8	2,806,565	2,806,565
Persediaan	9,16	6,603,277	7,969,769
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	10	6,286,710	8,036,710
Biaya dibayar di muka dan uang muka	11	3,911,212	3,661,212
Pajak dibayar di muka	21	-	3,126
Aset tetap untuk dijual	12	4,481,465	4,481,465
Jaminan pelaksanaan pekerjaan	13	2,513,494	2,513,494
		<u>36,728,345</u>	<u>36,732,710</u>
Aset tidak lancar			
Aset tetap	14,16	40,476,890	40,476,890
Aset pajak tangguhan	20	50,700,056	50,684,910
		<u>91,176,947</u>	<u>91,161,800</u>
JUMLAH ASET		<u>127,905,292</u>	<u>127,894,510</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas jangka pendek			
Utang usaha	15	199,141	199,141
Biaya yang masih harus dibayar	20	85,856	130,855
Utang pajak	21	-	-
Utang lain-lain	19	-	-
Utang bank jangka pendek	16	-	-
Utang sewa pembiayaan jatuh tempo 1 tahun atau kurang	17	-	-
		<u>284,997</u>	<u>329,995</u>
Liabilitas jangka panjang			
Utang bank jangka panjang	16	-	-
Utang sewa pembiayaan jatuh tempo lebih dari 1 tahun	17	-	-
Utang pihak berelasi	18	70,689,748	70,699,748
Liabilitas imbalan purna karya	22	1,341,121	1,286,013
		<u>72,030,869</u>	<u>71,985,761</u>
		<u>72,315,866</u>	<u>72,315,756</u>
Ekuitas			
Modal saham	23	120,000,000	120,000,000
Tambahan modal disetor	24	19,972,351	19,972,351
Modal saham diperoleh kembali	25	(26,009,555)	(26,009,555)
Penghasilan komprehensif lain		(2,963,663)	(2,963,663)
Saldo laba (defisit)	26		
Sudah ditentukan penggunaannya		1,000,000	1,000,000
Belum ditentukan penggunaannya		(56,409,707)	(56,420,380)
		<u>55,589,426</u>	<u>55,578,753</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>127,905,292</u>	<u>127,894,510</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31-Mar-19	31-Mar-18
Pendapatan usaha	27	3,422,023	3,338,455
Beban pokok pendapatan usaha	28	(2,643,435)	(3,192,011)
Laba kotor		778,588	146,445
Beban usaha	29	(856,465)	(830,760)
Laba (rugi) usaha		(77,877)	(684,315)
Pendapatan (beban) di luar usaha	30	73,403	(150,645)
Laba (rugi) sebelum pajak		(4,474)	(834,961)
Manfaat (beban) pajak penghasilan	21	15,146	255,370
Laba (rugi) bersih		10,673	(579,591)
Pendapatan komprehensif lainnya		-	-
Laba (rugi) komprehensif periode berjalan		<u>10,673</u>	<u>(579,591)</u>
Laba (rugi) bersih yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk		10,673	(579,591)
Laba (rugi) bersih tahun berjalan		<u>10,673</u>	<u>(579,591)</u>
Laba per saham			
Laba (rugi) bersih per saham dasar (Rupiah penuh)	31	<u>0</u>	<u>(1)</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk						
					Saldo laba		
	Modal saham	Tambahan modal disetor	Modal saham diperoleh kembali	Penghasilan komprehensif lain	Sudah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	Jumlah ekuitas
Saldo 1 Januari 2018	120,000,000	19,972,351	(26,009,555)	(3,049,229)	1,000,000	(52,590,531)	59,323,036
Laba (rugi) komprehensif 31 Maret 2018	-	-	-	-	-	(3,829,849)	(3,829,849)
Saldo per 31 Maret 2018	120,000,000	19,972,351	(26,009,555)	(3,049,229)	1,000,000	(56,420,380)	55,493,187
Saldo 1 Januari 2019	120,000,000	19,972,351	(26,009,555)	(2,963,663)	1,000,000	(56,420,380)	55,578,753
Laba (rugi) komprehensif 31 Maret 2019	-	-	-	-	-	10,673	10,673
Saldo per 31 Maret 2019	120,000,000	19,972,351	(26,009,555)	(2,963,663)	1,000,000	(56,409,707)	55,589,426

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31-Mar-19	31-Dec-18
Arus kas dari aktivitas operasi		
Penerimaan dari pelanggan	2,040,250	9,780,344
Pembayaran kas kepada :		
Pemasok	(1,625,091)	(3,550,445)
Karyawan	(879,856)	(1,922,279)
Kas dihasilkan dari operasi	(464,697)	4,307,621
Pembayaran beban keuangan-net	208,177	(638,257)
Penerimaan pajak		126,253
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	(256,520)	3,795,616
Arus kas dari aktivitas investasi		
Pembelian aset tetap	-	-
Hasil penjualan aset tetap	-	-
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	-	-
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penerimaan (pengembalian) pinjaman bank	-	-
Penerimaan (pengembalian) pinjaman dari pihak berelasi	(10,000)	(3,208,230)
Pembayaran utang sewa pembiayaan	-	-
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	(10,000)	(3,208,230)
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	(266,520)	587,386
Kas dan setara kas awal periode	1,403,521	816,135
Kas dan setara kas akhir periode	1,137,001	1,403,521

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Perdana Karya Perkasa Tbk (Perusahaan) didirikan di Samarinda dengan nama PT Perdana Karya Kaltim berdasarkan Akta No.17 tanggal 7 Desember 1983, yang selanjutnya diubah dengan Akta No.4 tanggal 4 November 1985, keduanya dibuat oleh Laden Mering SH, Calon Notaris di Samarinda. Pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No.C.24475.HT.01.01.TH.1986 tanggal 24 Juni 1986, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.10611/2006, Tambahan Berita Negara No.79/2006 tanggal 3 Oktober 2006.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta No. 09 tanggal 6 Agustus 2008 oleh Lia Chittawan Nanda Gunawan. SH, notaris di Jakarta, tentang penyesuaian seluruh anggaran dasar Perusahaan terhadap UU No.40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-86263-AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 4 November 2008.

Sesuai pasal 3 anggaran dasar, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha di bidang-bidang pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan, pertanian, pengangkutan darat, perbengkelan dan jasa-jasa melalui divisi-divisi usaha pertambangan batubara, konstruksi, dan persewaan peralatan berat. Perusahaan telah beroperasi komersial sejak 1983 dengan melaksanakan kegiatan usaha persewaan peralatan berat dan jasa yang terkait dengan konstruksi bangunan, dan selanjutnya sejak tahun 2005 juga beroperasi di bidang pertambangan batubara.

Perusahaan berdomisili di Graha Perdana, Jalan Sentosa 56 Samarinda, Kalimantan Timur.

Susunan pengurus perusahaan pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2019	31 Desember 2018
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama :	Hendry Widyanto	Hendry Widyanto
Komisaris :		
Komisaris Independen :	Elwin Rachmat	Elwin Rachmat
Direksi		
Direktur Utama :	Soerjadi Soedarsono	Soerjadi Soedarsono
Direktur Independen :	Untung Haryono	Untung Haryono
Komite Audit		
Ketua :	Elwin Rachmat	Elwin Rachmat
Anggota :	Sumarmo	Sumarmo
Anggota :	Dewi Kusumawati	Dewi Kusumawati

Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebanyak 18 orang.

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan

Perusahaan melaksanakan Penawaran Umum saham berdasarkan surat efektif dari Bapepam-LK No.S-3178/BL/2007 tanggal 27 Juni 2007 meliputi 125.000.000 saham (20,83%) saham biasa atas nama, harga nominal Rp 200 (dua ratus rupiah) setiap saham dengan harga Penawaran Umum sebesar Rp 400 (empat ratus rupiah) setiap saham. Saham-saham Perusahaan dicatat dan diperdagangkan pertama kali di Bursa Efek Indonesia di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2007.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STÁNDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan semua standar baru dan revisi serta interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015.

PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- PSAK 1 (revisi 2013), Penyajian Laporan Keuangan

Amandemen terhadap PSAK 1 memperkenalkan terminologi baru untuk laporan laba rugi komprehensif. Berdasarkan amandemen terhadap PSAK 1, laporan laba rugi komprehensif telah diubah namanya menjadi "laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain". Amandemen terhadap PSAK 1 mempertahankan opsi untuk menyajikan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain baik sebagai suatu laporan tunggal atau disajikan dalam dua laporan terpisah tetapi berturut-turut. Namun, amandemen terhadap PSAK 1, mengharuskan tambahan pengungkapan dalam bagian penghasilan komprehensif lain dimana pos-pos dari penghasilan komprehensif lain dikelompokkan menjadi dua kategori: (1) Tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi; dan (2) akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi.

Amandemen ini telah diterapkan secara retrospektif, dan oleh karena itu penyajian pos penghasilan komprehensif lain telah dimodifikasi untuk mencerminkan perubahan tersebut.

Amandemen PSAK 1 juga relevan terhadap Grup mengenai jika laporan posisi keuangan pada posisi awal periode terdekat sebelumnya (laporan posisi keuangan ketiga) dan catatan terkait harus disajikan. Amandemen menjelaskan bahwa laporan posisi keuangan ketiga diharuskan jika a) suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, atau penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi dari pos-pos dalam laporan keuangannya, dan b) penerapan penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi mempunyai pengaruh material atas informasi dalam laporan posisi keuangan ketiga. Amandemen menjelaskan bahwa catatan terkait tidak perlu disajikan dalam laporan posisi keuangan ketiga.

- PSAK 4 (revisi 2013), Laporan Keuangan Tersendiri

PSAK 4 (revisi 2009), "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri" telah diubah namanya menjadi PSAK 4 (revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri" yang menjadi suatu standar yang mengatur laporan keuangan tersendiri. Panduan yang telah ada untuk laporan keuangan tersendiri tetap tidak diubah.

- PSAK 15 (revisi 2013), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

PSAK 15 (revisi 2009), "Investasi pada Entitas Asosiasi" telah diubah namanya menjadi PSAK 15 (revisi 2013), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama". Ruang lingkup standar revisi diperluas untuk mencakup entitas yang merupakan investor dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas investee.

- PSAK 24 (revisi 2013), Imbalan Kerja

Amandemen terhadap PSAK 24 atas akuntansi program imbalan pasti dan pesangon. Perubahan paling signifikan terkait akuntansi atas perubahan dalam kewajiban manfaat pasti dan aset program. Amandemen mensyaratkan pengakuan perubahan dalam kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program ketika amandemen terjadi, dan karenanya menghapus pendekatan koridor yang diijinkan berdasarkan PSAK 24 versi sebelumnya dan mempercepat pengakuan biaya jasa lalu. Amandemen tersebut mensyaratkan seluruh keuntungan dan kerugian aktuarial diakui segera melalui penghasilan komprehensif lain agar supaya aset atau liabilitas pensiun bersih diakui dalam laporan posisi keuangan mencerminkan jumlah keseluruhan dari defisit atau surplus program. Selanjutnya, biaya bunga dan imbal hasil aset program yang digunakan dalam PSAK 24 versi sebelumnya digantikan dengan nilai "bunga neto" berdasarkan PSAK 24 (Revisi 2013) yang dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto.

Perubahan ini berdampak pada jumlah yang diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun-tahun sebelumnya (untuk rincian lihat tabel di bawah ini). Selanjutnya PSAK 24 (revisi 2013), memperkenalkan perubahan tertentu dalam penyajian biaya manfaat pensiun termasuk pengungkapan yang lebih luas.

Ketentuan transisi yang spesifik berlaku untuk penerapan pertama kali atas PSAK 24 (revisi 2013). Perusahaan menerapkan ketentuan transisi yang relevan dan menyajikan kembali jumlah-jumlah komparatif atas dasar retrospektif (untuk rincian lihat catatan 21 dan 38).

- PSAK 46 (revisi 2014), Pajak Penghasilan

Amandemen terhadap PSAK 46: (1) menghilangkan pengaturan tentang pajak final yang sebelumnya

PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

termasuk dalam ruang lingkup standar, dan (2) menetapkan praduga yang dapat dibantah bahwa jumlah tercatat properti investasi yang diukur menggunakan model nilai wajar dalam PSAK 13, Properti Investasi akan dipulihkan sepenuhnya melalui penjualan.

Berdasarkan amandemen tersebut, kecuali praduga yang dapat dibantah, pengukuran liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan yang disyaratkan untuk mencerminkan konsekuensi pajak dari pemulihan jumlah tercatat properti investasi melalui penjualan. Praduga penjualan ini dapat dibantah jika properti investasi dapat disusutkan dan investasi properti dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk mengonsumsi secara substantial seluruh manfaat ekonomis atas investasi properti dari waktu ke waktu, bukan melalui penjualan.

- **PSAK 48, Penurunan nilai Aset**

PSAK 48 telah diubah untuk memasukkan persyaratan dari PSAK 68, Pengukuran Nilai Wajar.

- **PSAK 50, Instrumen Keuangan: Penyajian**

Amandemen terhadap PSAK 50 mengklarifikasi penerapan tentang persyaratan saling hapus. Secara khusus, amandemen tersebut mengklarifikasi arti dari "saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus" dan "realisasi dan penyelesaian secara simultan". Amandemen tersebut juga mengklarifikasi bahwa pajak penghasilan yang terkait dengan distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas dan biaya transaksi dicatat sesuai dengan PSAK 46.

- **PSAK 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran**

Amandemen terhadap PSAK 55 memberikan panduan persyaratan untuk menghentikan akuntansi lindung nilai ketika derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dinovasi berdasarkan keadaan tertentu. Amandemen tersebut juga mengklarifikasi bahwa setiap perubahan nilai wajar derivatif yang ditetapkan sebagai suatu instrumen lindung nilai akibat dari novasi termasuk dalam penilaian dan pengukuran dari efektivitas lindung nilai. Selanjutnya, amandemen tersebut mengklarifikasi akuntansi dari derivatif melekat dalam hal reklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori nilai wajar melalui laba rugi – lihat pembahasan dalam ISAK 26.

Standar ini juga diubah untuk memasukkan persyaratan dari PSAK 68, Pengukuran Nilai Wajar.

- **PSAK 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan**

Amandemen terhadap PSAK 60 menambahkan persyaratan pengungkapan transaksi termasuk pengalihan aset keuangan. Amandemen ini dimaksudkan untuk memberikan transparansi yang lebih besar terkait eksposur risiko jika aset keuangan dialihkan tetapi entitas yang mengalihkan tetap memilih keterlibatan berkelanjutan atas aset tersebut. Amandemen tersebut juga mensyaratkan pengungkapan jika aset keuangan dialihkan tidak merata sepanjang periode. Selanjutnya, entitas disyaratkan untuk mengungkapkan tentang hak saling hapus dan pengaturan terkait (sebagai contoh persyaratan penyerahan (jaminan) untuk perjanjian keuangan berdasar perjanjian menyelesaikan secara netto yang dapat dipaksakan dan perjanjian serupa.

- **PSAK 65, Laporan Keuangan Konsolidasian**

PSAK 65 menggantikan bagian dari PSAK 4 (Revisi 2009), Laporan Keuangan Konsolidasian dan Tersendiri, yang mengatur dengan laporan keuangan konsolidasian, dan ISAK 7, Konsolidasian – Entitas Bertujuan Khusus.

Berdasarkan PSAK 65, terdapat hanya satu dasar untuk konsolidasian bagi seluruh entitas, dan dasarnya adalah pengendalian.

Definisi pengendalian yang lebih tegas dan diperluas termasuk tiga elemen: (a) kekuasaan atas investee; (b) eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee; dan (c) kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor. Sebelumnya, definisi pengendalian adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut.

PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PSAK 65 juga menambahkan pedoman penerapan untuk membantu dalam penilaian apakah investor mengendalikan investee dalam skenario yang kompleks.

PSAK 65 mensyaratkan investor menilai kembali apakah investor tersebut mempunyai pengendalian atas investee pada saat ketentuan transisi, dan mensyaratkan penerapan pernyataan ini secara retrospektif.

- **PSAK 66, Pengaturan Bersama**

PSAK 66 menggantikan PSAK 12, Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama.

- **PSAK 67, Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain**

PSAK 67 adalah standar pengungkapan baru dan berlaku untuk entitas yang mempunyai kepentingan dalam entitas anak, pengaturan bersama, entitas asosiasi atau entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi.

PSAK 67 berlaku untuk entitas yang mempunyai kepentingan dalam entitas anak, pengaturan bersama, entitas asosiasi atau entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi. Standar tersebut menetapkan tujuan pengungkapan dan menentukan pengungkapan minimum yang entitas harus berikan untuk memenuhi tujuan tersebut. Tujuan PSAK 67 adalah bahwa entitas harus mengungkapkan informasi yang membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan risiko yang terkait dengan kepentingannya dalam entitas lain dan dampak dari kepentingan tersebut terhadap laporan keuangannya.

- **PSAK 68, Pengukuran Nilai Wajar**

PSAK 68 menetapkan acuan tunggal atas pengukuran nilai wajar dan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar. Standar tersebut tidak mengubah persyaratan mengenai pos-pos yang harus diukur atau diungkapkan pada nilai wajar.

PSAK 68 mendefinisikan nilai wajar, menetapkan suatu kerangka dasar atas pengukuran nilai wajar, dan mensyaratkan pengungkapan tentang pengukuran nilai wajar. Ruang Lingkup PSAK 68 adalah luas; Standar tersebut berlaku baik pada pos-pos instrumen keuangan dan pos-pos instrumen nonkeuangan ketika PSAK lain mensyaratkan atau mengizinkan pengukuran nilai wajar dan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar, kecuali kondisi tertentu. Pada umumnya persyaratan pengungkapan dalam PSAK 68 adalah lebih luas dari pada standar yang diharuskan saat ini. Contohnya, pengungkapan secara kuantitatif dan kualitatif berdasarkan hirarki nilai wajar dalam tiga level yang saat ini diharuskan untuk instrumen keuangan berdasarkan PSAK 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan akan diperluas oleh PSAK 68 yang mencakup seluruh aset dan liabilitas dalam ruang lingkungannya.

PSAK 68 diterapkan secara prospektif; persyaratan pengungkapan ini tidak perlu diterapkan dalam informasi komparatif yang disediakan untuk periode sebelum penerapan awal standar ini.

- **ISAK 26, Penilaian Kembali Derivatif Melekat**

Amandemen terhadap ISAK 26 mengklarifikasi akuntansi derivatif melekat dalam hal reklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori nilai wajar melalui laba rugi.

Manajemen telah mengevaluasi bahwa penerbitan PSAK dan ISAK baru di atas tidak menimbulkan dampak yang material terhadap laporan keuangan Perusahaan secara keseluruhan.

b. Standar dan interpretasi telah diterbitkan tapi belum diterapkan

Standar dan penyesuaian standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK No. 5 (penyesuaian 2015), "Segmen Operasi";
- PSAK No. 7 (penyesuaian 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi";
- PSAK No. 13 (penyesuaian 2015), "Properti Investasi";
- PSAK No. 16 (penyesuaian 2015), "Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi";

PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- PSAK No. 19 (penyesuaian 2015), "Aset Tak berwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi";
- PSAK No. 22 (penyesuaian 2015), "Kombinasi Bisnis";
- PSAK No. 25 (penyesuaian 2015), "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan";
- PSAK No. 53 (penyesuaian 2015), "Pembayaran Berbasis Saham";
- PSAK No. 68 (penyesuaian 2015), "Pengukuran Nilai Wajar";

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, dengan penerapan secara retrospektif yaitu:

- PSAK No. 4, "Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri";
- PSAK No. 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi";
- PSAK No. 24, "Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja";
- PSAK No. 65, "Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian
- PSAK No. 66, "Pengaturan Bersama" tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama;
- PSAK No. 67, "Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain" tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi;
- ISAK No. 30, "Pungutan";

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Prakarsa Pengungkapan dan ISAK 31, "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi".

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu PSAK 69, "Agrikultur" dan amandemen PSAK 16, "Aset Tetap" tentang Agrikultur: Tanaman Produktif.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, manajemen sedang mengevaluasi dampak dari standar dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan Perusahaan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis, kecuali properti dan instrumen keuangan tertentu yang diukur pada jumlah revaluasi atau nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp).

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam mata uang fungsional Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional berdasarkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan.

Nilai tukar mata uang Dolar Amerika Serikat yang digunakan pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp 14.244 dan Rp 14.481 per 1 USD.

PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak - pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
- I. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor;
 - II. memiliki pengaruh signifikan entitas pelapor; atau
 - III. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
- I. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain).
 - II. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - III. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - IV. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - V. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - VI. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - VII. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

e. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai berikut:

- Tersedia untuk dijual
- Pinjaman yang diberikan dan piutang

Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Aset keuangan diklasifikasi dalam FVTPL, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual terkini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan yang diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal jika:

- penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya, dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan, dan informasi tentang Perusahaan disediakan secara internal kepada manajemen kunci entitas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi), misalnya direksi dan CEO.

PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan.

Dimiliki hingga jatuh tempo

aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan serta Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Kelompok aset ini selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai (jika ada).

Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok ini.

Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS)

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak tercatat di bursa yang tidak mempunyai kuotasi harga pasar di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diklasifikasikan sebagai AFS, diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kas dan setara kas, kecuali kas, piutang pelanggan dan piutang lain-lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau biaya selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan FVTPL.

Penurunan nilai aset keuangan

Pinjaman yang diberikan dan piutang dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Pinjaman yang diberikan dan piutang diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang dalam nilai wajar dari instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti obyektif terjadinya penurunan nilai.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan, jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat imbal hasil yang berlaku di pasar untuk aset keuangan yang serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

Jumlah tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang jumlah tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

Kecuali instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibalik melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai, sepanjang nilainya tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dibalik melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke pendapatan komprehensif lain.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

f. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pembelian kembali instrumen ekuitas Perusahaan (saham treasury) diakui dan dikurangkan secara langsung dari ekuitas. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan atau pembatalan instrumen ekuitas Perusahaan tersebut tidak diakui dalam laba rugi.

Liabilitas Keuangan

Utang usaha dan utang lain-lain, serta pinjaman lainnya pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

g. Saling hapus antar Aset keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika:

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui
- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

h. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

i. Persediaan

Perusahaan mengakui persediaan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dengan nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan biaya penjualan.

Perusahaan menetapkan penyisihan penurunan nilai persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala pada setiap akhir periode pelaporan atas kondisi fisik dan nilai realisasi bersih persediaan.

j. Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang Perusahaan yang berasal dari pekerjaan kontrak yang dilakukan untuk pemberi kerja, namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi, ditambah laba yang diakui dikurangi dengan jumlah kerugian yang diakui dan penagihan termin.

k. Aset Tetap

Aset tetap diakui sebesar biaya perolehan, dikurangi dengan akumulasi penyusutan, dan penurunan nilai jika ada.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi biaya perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan. Setelah pengakuan, aset tetap diukur dengan menggunakan model biaya.

Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus, berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Tahun</u>
Bangunan	20
Alat berat	8
Mesin dan peralatan	8
Kendaraan	4
Inventaris proyek	4
Inventaris kantor	4

Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.

Pengeluaran untuk perbaikan atau perawatan aset tetap untuk menjaga manfaat keekonomian masa yang akan datang dibebankan padalaporan laba rugi pada saat terjadinya. Penyempurnaan yang menambah nilai (kegunaan) dan masa manfaat, dan penambahan dalam jumlah yang signifikan dikapitalisasi.

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (derecognized) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul diakui dalam laporan laba rugi pada tahun berjalan.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari utang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

I. Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual

Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual (atau kelompok lepasan) diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual jika jumlah tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan dari pada melalui pemakaian berlanjut. Kondisi ini dianggap memenuhi hanya ketika aset (atau kelompok lepasan) adalah berada dalam keadaan segera dapat dijual dengan syarat-syarat yang biasa dan umum diperlukan dalam penjualan aset (atau kelompok lepasan) tersebut dan penjualannya harus sangat mungkin terjadi dan aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual (atau kelompok lepasan) harus tersedia untuk segera dijual.

Ketika Perusahaan berkomitmen terhadap rencana penjualan yang mengakibatkan kehilangan pengendalian atas entitas anak, seluruh aset dan liabilitas entitas anak tersebut diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual ketika kriteria yang dijelaskan di atas terpenuhi, terlepas pada apakah setelah penjualan tersebut Perusahaan masih memiliki kepentingan nonpengendali dalam entitas anak terdahulu atau tidak.

Ketika Perusahaan berkomitmen terhadap rencana penjualan yang melibatkan penjualan suatu investasi atau bagian dari investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama, investasi atau bagian dari investasi yang akan dijual diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual ketika kriteria yang dijelaskan di atas terpenuhi, dan Perusahaan menghentikan penggunaan metode ekuitas sehubungan dengan bagian investasi tersebut yang diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual.

Aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) diklasifikasi sebagai yang dimiliki untuk dijual diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

m. Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sebagai Lessor

Dalam sewa pembiayaan, lessor mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan sebesar jumlah investasi sewa neto Perusahaan. Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan dialokasikan pada periode akuntansi yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih lessor.

Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan dalam jumlah tercatat aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Sebagai Lessee

Aset pada sewa pembiayaan dicatat pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan Perusahaan yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Liabilitas kepada lessor disajikan di dalam laporan posisi keuangan sebagai liabilitas sewa pembiayaan.

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga yang konstan (tetap) atas saldo liabilitas. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (straight-line basis) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontinjen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

n. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Perusahaan mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset nonkeuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

o. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau dapat diterima. Pendapatan dikurangi dengan estimasi, retur, potongan harga dan diskon serta cadangan lain yang serupa. Kriteria pengakuan tertentu berikut harus dipenuhi sebelum pengakuan pendapatan diakui:

Pendapatan usaha batubara

Pendapatan dari penjualan batubara diakui pada saat risiko dan manfaat barang secara signifikan telah berpindah kepada pembeli.

Pendapatan jasa konstruksi dan jasa land clearing

Perusahaan mengakui pendapatan dari jasa konstruksi dan jasa land clearing dengan metode persentase penyelesaian. Jumlah pendapatan tahun berjalan diakui berdasarkan perbandingan antara jumlah biaya yang terjadi dengan total taksiran biaya proyek. Biaya yang terjadi, meliputi biaya material, tenaga kerja, dan biaya proyek tidak langsung lainnya, diakumulasi ke dalam akun 'Pekerjaan Dalam Pelaksanaan'.

PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan bunga

Pendapatan bunga diakui atas dasar proporsi waktu dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

p. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetapnya. Perusahaan juga membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Perusahaan menghitung selisih antara imbalan yang diterima karyawan berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan manfaat yang diterima dari program pensiun untuk pensiun normal.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode projected unit credit dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, perubahan dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera dalam saldo laba [Catatan: jika entitas memilih untuk menyajikannya sebagai pos terpisah pada ekuitas, disesuaikan dengan penyajian Laporan Perubahan Ekuitas dan gunakan: sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas] dan tidak akan direklas ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian)
- Beban atau pendapatan bunga neto
- Pengukuran kembali

Perusahaan menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi, Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Perusahaan. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomik yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan ke program.

Liabilitas untuk pesangon diakui pada lebih awal ketika entitas tidak dapat lagi menarik tawaran imbalan tersebut dan ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait.

q. Pajak Penghasilan

Pajak saat terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (bukan kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi.

PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Untuk tujuan pengukuran liabilitas pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan untuk properti investasi yang diukur dengan menggunakan model nilai wajar, nilai tercatat properti tersebut dianggap dipulihkan seluruhnya melalui penjualan, kecuali praduga tersebut dibantah. Praduga tersebut dibantah ketika properti investasi dapat disusutkan dan dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk mengonsumsi secara substansial seluruh manfaat ekonomi atas investasi properti dari waktu ke waktu, bukan melalui penjualan. Direksi Perusahaan mereview portofolio properti investasi Perusahaan dan menyimpulkan bahwa tidak ada properti investasi Perusahaan yang dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk mengonsumsi secara substansial seluruh manfaat ekonomi atas investasi properti dari waktu ke waktu, bukan melalui penjualan. Oleh karena itu, direksi telah menentukan bahwa praduga penjualan yang ditetapkan dalam amandemen PSAK 46 tidak dibantah. Akibatnya, Perusahaan tidak mengakui pajak tangguhan atas perubahan nilai wajar properti investasi karena Perusahaan tidak dikenakan pajak penghasilan atas perubahan nilai wajar properti investasi.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

r. Laba (rugi) per Saham

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba (rugi) per saham dilusian dihitung dengan membagi laba rugi bersih yang diatribusikan kepada Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

s. Informasi Segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan yang secara regular direview oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b. yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c. dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, Direksi diwajibkan untuk membuat penilaian, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode yang perkiraan tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode itu, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi kedua periode saat ini dan masa depan.

PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen tidak membuat pertimbangan kritis yang memiliki dampak signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan, selain dari estimasi yang diatur di bawah ini.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Masa Manfaat Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 8 tahun, suatu kisaran yang umumnya diperkirakan dalam industri sejenis. Perubahan dalam pola pemakaian dan tingkat perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis serta nilai sisa aset dan karenanya biaya penyusutan masa depan memiliki kemungkinan untuk diubah/direvisi. Jumlah tercatat aset tetap Perusahaan pada tanggal laporan keuangan diungkapkan di dalam Catatan 14 laporan keuangan.

Penurunan Nilai Piutang Usaha

Penurunan piutang usaha terjadi jika terdapat bukti objektif bahwa Perusahaan tidak dapat menagih seluruh atau sebagian nilai piutang sesuai dengan persyaratan awal piutang. Penilaian dilakukan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menentukan ada tidaknya indikasi penurunan nilai atau apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang sebelumnya diakui pada tahun-tahun sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Ketika hasil aktual berbeda dari jumlah yang awalnya dinilai, perbedaan tersebut akan mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat piutang usaha dalam laporan keuangan tahun berikutnya.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan pajak tertentu yang penentuan akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Ketika hasil pajak yang dikeluarkan berbeda dengan jumlah yang awalnya diakui, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan penyisihan pajak tangguhan pada periode di mana penentuan tersebut dilakukan.

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum dikompensasi sejauh besar kemungkinan bahwa laba fiskal akan tersedia untuk dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Penentuan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui berdasarkan perbedaan waktu dan laba fiskal di masa mendatang bersama-sama dengan strategi perencanaan pajak masa depan membutuhkan pertimbangan signifikan dari manajemen.

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Penentuan liabilitas imbalan pasca kerja dan beban imbalan pascakerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Hasil aktual yang berbeda dengan jumlah yang diestimasi diperlakukan sesuai dengan kebijakan sebagaimana diatur dalam catatan 3 atas laporan keuangan. Sementara manajemen Perusahaan berpendapat bahwa asumsi yang digunakan adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dari hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan secara material dapat mempengaruhi perkiraan jumlah liabilitas atas imbalan pascakerja dan beban imbalan pascakerja. Jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca kerja jangka panjang Perusahaan diungkapkan pada Catatan 21 laporan keuangan.

PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. KAS DAN SETARA KAS

	31-Mar-19	31-Dec-18
Kas tunai		
<i>Dalam Rupiah</i>	33,649	39,295
Kas di bank pihak ketiga		
<i>Dalam Rupiah</i>		
PT Bank BPD Kaltim	25,523	25,523
PT Bank BRI (Persero) Tbk	815,973	1,061,626
PT Bank Bukopin	14,018	14,018
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	233,596	248,562
<i>Dalam Dolar AS</i>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	14,242	14,498
	<u>1,137,001</u>	<u>1,403,521</u>

6. PIUTANG USAHA

	31-Mar-19	31-Dec-18
Pihak ketiga		
Piutang usaha batubara	3,734,144	3,769,048
Piutang usaha jasa kontruksi dan land clearing	10,085,019	6,918,342
Piutang usaha sewa peralatan berat	1,599,375	1,599,375
	<u>15,418,538</u>	<u>12,286,764</u>
Penyisihan piutang tak tertagih	(6,429,916)	(6,429,916)
	<u>8,988,622</u>	<u>5,856,848</u>

Piutang usaha berdasarkan umur :

Umur Piutang	31-Mar-19	31-Dec-18
1 - 30 hari	800,016	625,331
31 - 90 hari	3,091,863	-
91 - 180 hari	-	-
Lebih dari 180 hari	11,526,659	11,661,433
	<u>15,418,538</u>	<u>12,286,764</u>
Penyisihan piutang tak tertagih	(6,429,916)	(6,429,916)
	<u>8,988,622</u>	<u>5,856,848</u>

Piutang usaha batubara

	31-Mar-19	31-Dec-18
Pihak ketiga		
<i>Dalam Rupiah</i>		
Indomineral Mega Perkasa PT	875,000	875,000
Sarana Marine Perkasa PT	512,207	512,207
Merry Jaya CV	249,159	249,159
<i>Dalam Dolar AS</i>		
Sarana Marine Perkasa PT	563,822	573,203
Windu Kencana Adisakti PT	1,533,956	1,559,479
Subjumlah (A)	<u>3,734,144</u>	<u>3,769,048</u>

PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Piutang usaha jasa konstruksi dan land clearing	31-Mar-19	31-Dec-18
<i>Dalam Rupiah</i>		
Vico Indonesia	-	-
Meindo Elang Indah PT	133,800	133,800
Multi Structure PT	-	-
Santos Pty Ltd	3,891,879	625,331
Nestor PT	40,425	40,425
Semberani Persada Oil PT	16,614	16,614
<i>Dalam Dolar AS</i>		
Salamander Energy Ltd	4,634,997	4,712,117
Bima Nusa International PT	735,341	747,576
Mawar Mahakam PT	-	-
Semberani Persada Oil PT	631,964	642,479
Subjumlah (B)	10,085,019	6,918,342
Piutang usaha sewa peralatan berat	31-Mar-19	31-Dec-18
PT BKPL	1,599,375	1,599,375
Subjumlah (C)	1,599,375	1,599,375
Jumlah (A+B+C)	15,418,538	12,286,764
Berdasarkan penelaahan pada akhir periode pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan piutang telah memadai untuk menutup kerugian yang timbul dari kegagalan penagihan piutang.		
7. PIUTANG RETENSI	31-Mar-19	31-Dec-18
Pihak ketiga		
<i>Dalam Rupiah</i>		
	-	-
	-	-
8. PIUTANG LAIN-LAIN	31-Mar-19	31-Dec-18
Pihak berelasi		
<i>Dalam Rupiah</i>		
Piutang Karyawan	2,761,565	2,761,565
Pihak ketiga		
<i>Dalam Rupiah</i>		
PT Modern Widya Tehnical	45,000	45,000
Penjualan Aset Tetap	-	-
	2,806,565	2,806,565
Berdasarkan penelaahan pada akhir periode pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan piutang telah memadai untuk menutup kerugian yang timbul dari kegagalan penagihan piutang.		
9. PERSEDIAAN	31-Mar-19	31-Dec-18
<i>Dalam Rupiah</i>		
Material konstruksi dan suku cadang	6,334,533	7,651,025
BBM dan pelumas	268,744	318,744
	6,603,277	7,969,769
Penyisihan penurunan nilai persediaan	-	-
	6,603,277	7,969,769

PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA

Tagihan berdasarkan jenis usaha sebagai berikut:

	31-Mar-19	31-Dec-18
Konstruksi	6,286,710	8,036,710
Land clearing	-	-
	<u>6,286,710</u>	<u>8,036,710</u>

Tagihan berdasarkan jenis usaha sebagai berikut:

Pihak ketiga

	31-Mar-19	31-Dec-18
Vico Indonesia	-	-
Total E&P Indonesia PT	-	-
Salamander Energy Ltd	2,664,884	2,664,884
Santos Pty Ltd	3,621,826	5,371,826
Tapien Nadenggan (Smart Tbk)	-	-
	<u>6,286,710</u>	<u>8,036,710</u>

11. BIAJA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA

Pihak ketiga

	31-Mar-19	31-Dec-18
Uang muka pembelian aset tetap	1,550,670	1,550,670
Uang muka pekerjaan	2,360,542	2,110,542
	<u>3,911,212</u>	<u>3,661,212</u>

12. ASET TETAP UNTUK DIJUAL

Manajemen Perseroan telah memutuskan untuk menjual aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi dan memiliki nilai jual.

	Alat berat	Kendaraan	Jumlah
Biaya perolehan			
Saldo 1 Januari 2018	9,840,049	-	9,840,049
Penambahan	-	-	-
Penjualan	-	-	-
Saldo 31 Desember 2018 (A)	<u>9,840,049</u>	<u>-</u>	<u>9,840,049</u>
Penambahan	-	-	-
Penjualan	-	-	-
Saldo 31 Maret 2019 (B)	<u>9,840,049</u>	<u>-</u>	<u>9,840,049</u>
Akumulasi penyusutan			
Saldo 1 Januari 2018	5,358,584	-	5,358,584
Penambahan	-	-	-
Penjualan	-	-	-
Saldo 31 Desember 2018 (C)	<u>5,358,584</u>	<u>-</u>	<u>5,358,584</u>
Penambahan	-	-	-
Penjualan	-	-	-
Saldo 31 Maret 2019 (D)	<u>5,358,584</u>	<u>-</u>	<u>5,358,584</u>
Jumlah tercatat 31 Des 2018 (A - C)	<u>4,481,465</u>	<u>-</u>	<u>4,481,465</u>
Jumlah tercatat 31 Maret 2019 (B - D)	<u>4,481,465</u>	<u>-</u>	<u>4,481,465</u>

Aset tetap yang diputuskan untuk dijual umumnya merupakan jenis barang yang spesifik dan dengan pembeli yang spesifik pula, sehingga sejak diputuskan untuk dijual hingga realisasi penjualannya memerlukan jangka waktu cukup lama.

PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

	31-Mar-19	31-Dec-18
Bank garansi		
<i>Santos Pty Ltd</i>		
Blanket Construction Services #903539	2,209,205	2,209,205
Call Out Fabrication and Construction Services #904118	304,289	304,289
	<u>2,513,494</u>	<u>2,513,494</u>

Jaminan pelaksanaan pekerjaan merupakan uang jaminan penerbitan bank garansi untuk jaminan pelaksanaan (*performance bond*) pekerjaan konstruksi berdasarkan ketentuan kontrak masing-masing pekerjaan.

14. ASET TETAP

	31-Mar-19			
	Saldo 1-Jan-18	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Mar-19
Biaya perolehan				
Pemilikan langsung				
Tanah	10,476,891	-	-	10,476,891
Bangunan	3,810,109	-	-	3,810,109
Alat berat	168,388,509	-	-	168,388,509
Mesin dan peralatan	19,039,142	-	-	19,039,142
Kendaraan	24,510,089	-	-	24,510,089
Inventaris proyek	863,092	-	-	863,092
Inventaris kantor	1,241,847	-	-	1,241,847
Aset dlm pelaksanaan	30,000,000	-	-	30,000,000
Sewa pembiayaan	-			
Alat berat	-	-	-	-
Mesin dan peralatan	-	-	-	-
Kendaraan	586,700	-	-	586,700,000
	<u>258,916,378</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>258,916,378</u>
Akumulasi penyusutan				
Pemilikan langsung				
Bangunan	3,810,108	-	-	3,810,108
Alat berat	168,388,509	-	-	168,388,509
Mesin dan peralatan	19,039,142	-	-	19,039,142
Kendaraan	24,510,089	-	-	24,510,089
Inventaris proyek	863,093	-	-	863,093
Inventaris kantor	1,241,847	-	-	1,241,847
Sewa pembiayaan	0			
Alat berat	0	-	-	-
Mesin dan peralatan	0	-	-	-
Kendaraan	586,700	-	-	586,700,000
	<u>218,439,487</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>218,439,487</u>
Jumlah tercatat	<u>40,476,890</u>			<u>40,476,890</u>

PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31-Dec-18				
	Saldo 1-Jan-18	Penambahan	Reklasifikasi	Saldo 31-Dec-18
Biaya perolehan				
Pemilikan langsung				
Tanah	10,476,891	-	0	10,476,891
Bangunan	3,810,109	-	0	3,810,109
Alat berat	168,388,509	-	-	168,388,509
Mesin dan peralatan	19,039,142	-	-	19,039,142
Kendaraan	24,216,739	293,350,000	-	24,510,089
Inventaris proyek	863,092	-	-	863,092
Inventaris kantor	1,241,847	-	-	1,241,847
Aset dalam pelaksanaan	30,000,000	-	-	30,000,000
Sewa pembiayaan				
Alat berat	-	-	-	-
Mesin dan peralatan	-	-	-	-
Kendaraan	293,350	-	293,350,000	586,700
	258,329,678	293,350,000	293,350	258,916,378
Akumulasi penyusutan				
Pemilikan langsung				
Bangunan	3,810,108	-	-	3,810,108
Alat berat	168,388,509	-	-	168,388,509
Mesin dan peralatan	18,540,824	498,318	-	19,039,142
Kendaraan	24,216,739	293,350	-	24,510,089
Inventaris proyek	863,093	-	-	863,093
Inventaris kantor	1,241,847	-	-	1,241,847
Sewa pembiayaan				
Alat berat	-	-	-	-
Mesin dan peralatan	-	-	-	-
Kendaraan	293,350	-	293,350,000	586,700
	217,354,470	791,668	293,350	218,439,487
Jumlah tercatat	40,975,208			40,476,890
Alokasi penyusutan aset tetap		31-Mar-19	31-Dec-18	
Beban pokok pendapatan usaha :				
Usaha jasa konstruksi dan land clearing		-	2,020,190	
Beban umum dan administrasi		-	6,468,165	
		0	8,488,355	
15. UTANG USAHA		31-Mar-19	31-Dec-18	
Pihak ketiga				
<i>Dalam Rupiah</i>				
Lain-lain (di bawah Rp 100 juta)		199,141	199,141	
Jumlah utang usaha		199,141	199,141	

PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Utang usaha berdasarkan umur :

	31-Mar-19	31-Dec-18
Umur utang		
1 - 30 hari	-	-
31 - 90 hari	-	-
91 - 180 hari	-	-
Lebih dari 180 hari	199,141	199,141
	<u>199,141</u>	<u>199,141</u>

Utang usaha kepada para pemasok merupakan saldo transaksi pembelian material dan suku cadang proyek, barang untuk pakai dan jasa. Pada tanggal laporan keuangan tidak ada pemasok dengan nilai pembelian Perseroan meliputi 10% atau lebih dari pendapatan usaha Perseroan.

16. UTANG BANK

	31-Mar-19	31-Dec-18
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-
Jumlah	<u>-</u>	<u>-</u>

Perseroan memperoleh pinjaman dari PT Royal Victoria Hotel berdasarkan perjanjian yang ditandatangani tanggal 5 April 2017 dan addendum I tanggal 7 Juni 2017 untuk melunasi utang Perseroan kepada Bank Mandiri. Transaksi ini telah mendapat persetujuan dari pemegang saham melalui RUPSLB tanggal 12 Juli 2017. Pelunasan kepada Bank Mandiri dilakukan pada tanggal 31 Juli 2017.

17. UTANG SEWA PEMBIAYAAN

	31-Mar-19	31-Dec-18
Berdasarkan jatuh temponya:		
Bagian yang akan jatuh tempo ≤ 1 tahun	-	-
Bagian yang akan jatuh tempo > 1 tahun	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

18. UTANG PIHAK BERELASI

	31-Mar-19	31-Dec-18
Hotel Royal Victoria	70,689,748	70,699,748
Jumlah utang lain-lain jangka pendek	<u>70,689,748</u>	<u>70,699,748</u>

19. UTANG LAIN-LAIN

	31-Mar-19	31-Dec-18
Jangka pendek		
Pihak ketiga		
KUD Kopta Samarinda	-	-
Jumlah utang lain-lain jangka pendek	<u>-</u>	<u>-</u>
Jangka panjang		
Jumlah utang lain-lain jangka panjang	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah	<u>-</u>	<u>-</u>

PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. BIAAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	31-Mar-19	31-Dec-18
Beban operasional	85,856	130,855
	<u>85,856</u>	<u>130,855</u>

21. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka

Perseroan

Pajak pertambahan nilai	-	3,126
PPH badan pasal 29 (disetor)	-	-
PPH Pasal 23	-	-
Jumlah	<u>-</u>	<u>3,126</u>

b. Utang pajak

Pph pasal 19 atas penilaian kembali aset tetap	-	-
Pph pasal 23 fee konsesi batubara	-	-
Denda-denda	-	-
Jumlah utang pajak	<u>-</u>	<u>-</u>

c. Pajak penghasilan

Perseroan

Kini		
Pajak final	-	57,000
Pajak tidak final	-	-
Tangguhan	15,146	(3,717,202)
Manfaat (beban) pajak penghasilan	<u>15,146</u>	<u>(3,660,202)</u>

Pajak kini

Rekonsiliasi antara laba Perseroan sebelum pajak penghasilan dengan estimasi penghasilan kena pajak untuk periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	31-Mar-19	31-Dec-18
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan - Perseroan	(4,474)	(169,647)
Penyesuaian fiskal:		
Pendapatan jasa giro - pajak final	(1,004)	(4,360)
Pendapatan jasa konstruksi, land clearing dan sewa - pajak final	-	(57,000)
Beban yang tidak dapat dikurangkan	-	51,300
Angsuran sewa pembiayaan	-	-
Penyusutan aset sewa pembiayaan	-	-
Beban imbalan purna karya	-	305,998
Laba (rugi) fiskal periode berjalan	(5,477)	126,291
Akumulasi rugi fiskal awal periode	(195,023,710)	(195,150,001)
Akumulasi rugi fiskal akhir periode	(195,029,187)	(195,023,710)
Pajak penghasilan (Tidak final)	<u>NIHIL</u>	<u>NIHIL</u>

Pajak tangguhan

Tarif pajak 25%	1-Jan-18	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain	31-Mar-19
Piutang usaha	1,607,479	-	-	1,607,479
Liabilitas imbalan purna karya	321,503	13,777	-	335,280
Akumulasi rugi fiskal	48,755,928	1,369	-	48,757,297
	<u>50,684,910</u>	<u>15,146</u>	<u>-</u>	<u>50,700,056</u>

PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tarif pajak 25%	1-Jan-18	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain	31-Dec-18
Piutang usaha	1,607,479	-	-	1,607,479
Liabilitas imbalan purna karya	239,123	82,380	-	321,503
Akumulasi rugi fiskal	52,555,510	(3,799,582)	-	48,755,928
	<u>54,402,112</u>	<u>(3,717,202)</u>	<u>-</u>	<u>50,684,910</u>

22. LIABILITAS IMBALAN PURNA KARYA

Sesuai dengan undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Perseroan wajib memberikan imbalan purna karya kepada karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja atau pada saat karyawan menyelesaikan masa kerjanya, Imbalan purna karya ini diberikan terutama berdasarkan masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja atau selesainya masa kerja. Dengan demikian Perseroan mencatat liabilitas imbalan purna karya yang diwajibkan Undang-undang No.13/2003.

Ikhtisar liabilitas imbalan purna karya yang diakui di laporan posisi keuangan :

	31-Mar-19	31-Dec-18
Saldo awal periode	1,286,013	1,065,581
Beban imbalan purna karya	55,108	305,998
Pendapatan komprehensif lain	-	(85,566)
Pembayaran imbalan purna karya	-	-
Saldo akhir periode	<u>1,341,121</u>	<u>1,286,013</u>

Ikhtisar imbalan purna karya yang dibebankan pada laporan laba rugi :

	31-Mar-19	31-Dec-18
Beban jasa kini	55,108	220,432
Beban bunga	-	85,566
	<u>55,108</u>	<u>305,998</u>
Diakui pada penghasilan komprehensif lain - pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti	-	85,566
Jumlah yang diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	<u>55,108</u>	<u>391,564</u>

Liabilitas imbalan purna karya ditentukan dengan metode Projected Credit Unit dengan asumsi sebagai berikut :

	31-Mar-19	31-Dec-18
Tingkat mortalita	TMI III	TMI III
Tingkat diskonto per tahun	8.93%	8.93%
Kenaikan gaji per tahun	8.00%	8.00%
Usia pensiun	55 tahun	55 tahun

23. MODAL SAHAM

Modal dasar Perseroan sebanyak 1.500.000.000 saham dengan nilai nominal Rp200 setiap saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 600.000.000 saham.

Kepemilikan saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang masing-masing diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, sebagai berikut :

Pemegang Saham	Saham	31-Mar-19		Saham	31 Desember 2018	
		Nominal	%		Nominal	%
1. Soerjadi Soedarsono	215,710,148	43,142,029,600	35.95%	215,710,148	43,142,029,600	35.95%
2. Fanny Listiawati	81,673,614	16,334,722,800	13.61%	81,673,614	16,334,722,800	13.61%
3. Publik (kepemilikan < 5%)	241,984,738	48,396,947,600	40.33%	241,984,738	48,396,947,600	40.33%
Subjumlah	539,368,500	107,873,700,000	89.89%	539,368,500	107,873,700,000	89.89%
Perseroan (<i>treasury stocks</i>)	60,631,500	12,126,300,000	10.11%	60,631,500	12,126,300,000	10.11%
Jumlah	<u>600,000,000</u>	<u>120,000,000,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>600,000,000</u>	<u>120,000,000,000</u>	<u>100.00%</u>

24. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Berdasarkan surat efektif dari Bapepam LK No.S-3178/BL/2007 tanggal 27 Juni 2007 terhadap Pernyataan Pendaftaran Perseroan, Perseroan

PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

melaksanakan Penawaran Umum Saham biasa atas nama sebanyak 125.000.000 saham, nilai nominal Rp. 200 setiap saham, dengan harga Penawaran Umum sebesar Rp. 400 setiap saham, atau Perseroan memperoleh agio sebesar Rp. 25.000.000.000. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-6/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 biaya pelaksanaan Penawaran Umum sebesar Rp. 5.027.648.646 dicatat sebagai pengurang agio saham yang diperoleh tersebut di atas. Tambahan modal disetor (agio saham) setelah dikurangi biaya pelaksanaan Penawaran Umum di atas Rp. 19.972.351.354.

25. MODAL SAHAM DIPEROLEH KEMBALI

Perseroan melaksanakan pembelian kembali saham berdasarkan Peraturan Bapepam No.XI.B.3, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-405/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Pembelian Kembali Saham Emiten Atau Perusahaan Tercatat Dalam Kondisi Pasar Berpotensi Krisis. Saham-saham yang dibeli kembali dicatat berdasarkan biaya perolehan dan jumlah Modal Saham Diperoleh Kembali berjumlah 60.631.500 saham dengan biaya perolehan sebesar Rp. 26.009.555.250.

26. SALDO LABA SUDAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

Akun ini merupakan cadangan umum yang disisihkan dari laba bersih dengan saldo sebesar Rp.1.000.000.000.

27. PENDAPATAN USAHA

	31-Mar-19	31-Mar-18
<i>Pihak ketiga</i>		
Pendapatan jasa konstruksi dan land clearing	3,422,023	3,338,455
Jumlah	<u>3,422,023</u>	<u>3,338,455</u>

	31-Mar-19		31-Mar-18	
	Rupiah	%	Rupiah	%
Pelanggan				
Vico Indonesia	-	0%	-	0%
Santos Pty Ltd	3,422,023	100%	3,338,455	100%
Lain-lain	-	0%	-	0%
	<u>3,422,023</u>	<u>100%</u>	<u>3,338,455</u>	<u>100%</u>

28. BEBAN POKOK PENDAPATAN USAHA

	31-Mar-19	31-Mar-18
Usaha jasa konstruksi dan land clearing	2,643,435	3,192,011
Jumlah	<u>2,643,435</u>	<u>3,192,011</u>

Beban pokok pendapatan jasa konstruksi dan land clearing

	31-Mar-19	31-Mar-18
Beban langsung		
Material	697,986	782,845
Tenaga kerja	419,781	533,646
Beban tidak langsung		
BBM dan pelumas	-	88,768
Sewa dan jasa lainnya	1,396,771	1,499,381
Tunjangan dan kesejahteraan	63,911	62,443
Konsumsi	-	-
Pengobatan	252	-
HSES	32,500	5,100
Premi dan insentif	-	-
Pemeliharaan	562	-
Penyusutan	-	118,600
Angkutan (mobilisasi)	-	-
Lain-lain	31,673	101,228
Jumlah beban pokok pendapatan jasa konstruksi dan land clearing	<u>2,643,435</u>	<u>3,192,011</u>

29. BEBAN USAHA

	31-Mar-19	31-Mar-18
Beban penjualan dan pemasaran:		

PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Analisa & test lab	-	38,000
Transportasi	-	-
Administrasi tender	-	-
	-	38,000
Beban umum dan administrasi		
Karyawan	271,628	277,611
Keperluan kantor	-	14,091
Pemeliharaan	402,168	2,890
Kendaraan dan transportasi	16,267	550
Penyusutan	-	379,718
Pos dan telekomunikasi	110,847	5,770
Jasa profesional	4,623	1,171
Perijinan dan pajak	213	3,856
Asuransi	-	-
Listrik dan air	219	1,995
Imbalan purna karya	-	55,108
Lain-lain	50,500	50,000
	856,465	792,760
Jumlah beban usaha	856,465	830,760
30. PENDAPATAN (BEBAN) DI LUAR USAHA	31-Mar-19	31-Mar-18
Pendapatan di luar usaha		
Pendapatan bunga dan jasa giro	1,004	1,862
Laba selisih kurs	-	118,283
Pendapatan di luar usaha lainnya	210,000	160,000
	211,004	280,145
Beban di luar usaha		
Rugi selisih kurs	(134,774)	-
Bunga pinjaman bank	-	-
Bunga sewa pembiayaan	-	-
Administrasi bank	(2,826)	(790)
Bunga pinjaman lainnya	-	(430,000)
Denda-denda	-	-
	(137,600)	(430,790)
Jumlah bersih	73,403	(150,645)
31. LABA PER SAHAM DASAR	31-Mar-19	31-Mar-18
Laba per Saham dasar:		
Laba (rugi) bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	10,673	(579,591)
Jumlah saham beredar	539,369	539,369
Laba (rugi) bersih per saham dasar (Rupiah penuh)	0.02	(1)

32. INFORMASI SEGMENT

Untuk tujuan pelaporan, manajemen Perseroan mengklasifikasikan kegiatan usahanya sebagai bentuk primer pelaporan segmen, terdiri dari usaha pertambangan batubara, usaha jasa konstruksi land clearing, dan usaha sewa alat berat. Sedangkan untuk pelaporan segmen sekunder, Perseroan tidak mengklasifikasikan kegiatan usahanya berdasarkan wilayah geografis, karena di antara wilayah-wilayah ekonomi di mana kegiatan usaha Perseroan dilaksanakan tidak mempunyai risiko dan imbalan yang berbeda secara signifikan. Pelaporan segmen usaha Perseroan adalah sebagai berikut :

Aset segmen	31-Mar-19		
	Pertambangan batubara	Jasa Konstruksi & Land clearing	Penyewaan alat berat
Piutang usaha	3,734,144	10,085,019	1,599,375
			Jumlah
			15,418,538

PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Piutang retensi	-	-	-	-
Tagihan bruto pemberi kerja	-	6,286,710	-	6,286,710
Aset tetap untuk dijual	-	4,481,465	-	4,481,465
Aset tetap	-	40,476,890	-	40,476,890
Jaminan pelaksanaan pekerjaan	-	2,513,494	-	2,513,494
	3,734,144	63,843,579	1,599,375	69,177,097
Aset tidak dialokasikan				58,728,195
Jumlah aset				127,905,292

Liabilitas segmen

Biaya yang masih harus dibayar	-	85,856	-	85,856
Utang lain-lain	-	-	-	-
Utang bank	-	74,154,476	-	74,154,476
Utang sewa pembiayaan	-	-	-	-
	-	74,240,331	-	74,240,331
Liabilitas tidak dialokasikan				(1,924,465)
Jumlah liabilitas				72,315,866

31-Mar-19

	Pertambangan batubara	Jasa Konstruksi & Land clearing	Penyewaan alat berat	Jumlah
Hasil usaha segmen				
Pendapatan usaha :				
- Pihak berelasi	-	-	-	-
- Pihak ketiga	-	3,422,023	-	3,422,023
Beban pokok pendapatan	-	2,643,435	-	2,643,435
Laba kotor	-	778,588	-	778,588
Beban usaha				856,465
Laba usaha				(77,877)
Pendapatan (beban) lain-lain				73,403
Laba sebelum pajak				(4,474)
Pajak penghasilan				
Pajak kini				0
Pajak tangguhan				15,146
Laba (rugi) bersih				10,673
Pendapatan komprehensif lainnya				-
Laba (rugi) komprehensif periode berjalan				10,673

31-Mar-18

	Pertambangan batubara	Jasa Konstruksi & Land clearing	Penyewaan alat berat	Jumlah
Aset segmen				
Piutang usaha	3,662,274	10,136,244	1,599,375	15,397,893
Piutang retensi	-	-	-	-
Tagihan bruto pemberi kerja	-	9,118,668	-	9,118,668
Aset tetap untuk dijual	-	4,481,465	-	4,481,465
Aset tetap	-	40,476,890	-	40,476,890
Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan	-	2,209,205	-	2,209,205
	3,662,274	66,422,473	1,599,375	71,684,122
Aset tidak dialokasikan				65,107,054
Jumlah aset				136,791,175
Liabilitas segmen				
Biaya yang masih harus dibayar	-	86,211	-	86,211
Utang lain-lain	2,781,401	-	-	2,781,401
Utang pihak berelasi	-	74,154,476	-	74,154,476

PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Utang sewa pembiayaan	-	-	-	-
	2,781,401	74,240,686	-	77,022,087
Liabilitas tidak dialokasikan				1,025,643
Jumlah liabilitas				78,047,730

	31-Mar-18			Jumlah
	Pertambangan batubara	Jasa Konstruksi & Land clearing	Penyewaan alat berat	
Hasil usaha segmen				
Pendapatan usaha :				
- Pihak berelasi	-	-	-	-
- Pihak ketiga	-	3,338,455	-	3,338,455
Beban pokok pendapatan	-	3,192,011	-	3,192,011
Laba kotor	-	146,445	-	146,445
Beban usaha				830,760
Laba usaha				(684,315)
Pendapatan (beban) lain-lain				(150,645)
Laba sebelum pajak				(834,960)
Pajak penghasilan				
Pajak kini				13,500
Pajak tangguhan				255,369
Laba (rugi) bersih				(566,091)
Pendapatan komprehensif lainnya				0
Laba (rugi) komprehensif periode berjalan				(566,091)

33. KOMITMEN

Selain perikatan dan komitmen yang telah diungkapkan di atas, Perseroan memiliki perikatan dan komitmen kontrak pekerjaan yang masih berlaku pada akhir periode pelaporan sebagai berikut:

Santos Energy (Sampang) Pty Ltd

- Kontrak No. 903539, Pekerjaan Call Out Fabrication and Construction Services dari Santos Energy Pty. Ltd. dengan harga kontrak sebesar IDR 44.184.099.827,14 ditambah addendum 10%, jangka waktu 25 Januari 2016 sampai dengan 24 Januari 2019.
- Kontrak No. 904118, Pekerjaan Call Out Fabrication and Construction Services dari Santos Energy Pty. Ltd. dengan harga kontrak sebesar IDR 6.085.779.950,89, jangka waktu 6 September 2018 sampai dengan 5 September 2019.

34. MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko dapat dikelompokkan menjadi manajemen risiko modal dan manajemen risiko keuangan.

a. Manajemen Risiko Modal

Perseroan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Struktur modal Perseroan terdiri dari liabilitas termasuk utang bank (Catatan 16), utang sewa pembiayaan (Catatan 17), kas dan setara kas (Catatan 4) dan modal tersedia bagi para pemegang saham, terdiri dari modal saham (Catatan 21), tambahan modal disetor (Catatan 22), dan saldo laba, sebagaimana diungkapkan dalam laporan keuangan.

Direksi secara berkala melakukan review struktur permodalan Perseroan. Sebagai bagian dari review ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Gearing ratio pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	31-Mar-19	31-Dec-18
Pinjaman	72,315,866	70,898,889
Kas dan setara kas	1,137,001	1,403,521
Pinjaman-neto	71,178,865	69,495,368
Ekuitas	55,589,426	55,578,753
Rasio pinjaman terhadap ekuitas	128%	125%

b. Manajemen Risiko Keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko nilai tukar mata uang asing, risiko tingkat bunga, risiko kredit dan risiko

PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

likuiditas. Perseroan dan entitas anak beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Direksi.

i. Manajemen Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko di mana nilai wajar atas arus kas kontraktual masa depan dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar. Saat ini kegiatan operasi usaha Perseroan didominasi oleh mata uang fungsional Perseroan, yaitu mata uang Rupiah. Manajemen secara berkala melakukan penelaahan terhadap eksposur mata uang asing yang dimiliki.

ii. Manajemen Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar arus kas kontraktual masa depan dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan tingkat suku bunga pasar. Dalam pengelolaan risiko suku bunga, Perseroan mengelola tingkat suku bunga dengan mengevaluasi tren pasar. Manajemen juga melakukan penilaian antara suku bunga yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan, baik perbankan maupun lembaga pembiayaan untuk mendapat tingkat suku bunga paling baik, dan secara teratur menyiapkan proyeksi arus kas untuk pembayaran pinjaman terkait.

iii. Manajemen Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan pelanggan memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada Perseroan. Saat ini transaksi Perseroan dilakukan dengan pelanggan yang memiliki kredibilitas baik dan manajemen secara berkala melakukan pemantauan terhadap umur saldo piutang yang dimiliki.

Berikut ini eksposur maksimum risiko kredit Perseroan pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018:

Kredit dan piutang	31-Mar-19	31-Dec-18
Kas	1,137,001	1,403,521
Piutang usaha	8,988,622	5,856,848
Piutang retensi	-	-
Piutang lain-lain	2,806,565	2,806,565
Jaminan pelaksanaan pekerjaan	2,513,494	2,513,494
	15,445,682	12,580,428

iv. Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul karena kurangnya likuiditas Perseroan untuk menutup kewajiban jangka pendek yang dimiliki.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas serta aset lancar lainnya yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perseroan dan untuk mengatasi dampak fluktuatif arus kas. Perseroan memastikan memiliki akses pada setiap saat yang untuk dapat memperoleh pinjaman (termasuk kepada pihak berelasi) dengan biaya pendanaan yang kompetitif serta persyaratan pendanaan yang baik.

Berikut ini jadwal jatuh tempo liabilitas Perseroan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskonto pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018:

	31-Mar-19			
	< 1 tahun	1 - 2 tahun	> 2 tahun	Jumlah
Liabilitas				
Utang usaha	199,141	-	-	199,141
Biaya yg masih harus dibayar	85,856	-	-	85,856
Bank	-	-	-	-
Sewa pembiayaan	-	-	-	-
Utang lain-lain	-	-	-	-
Jumlah	284,997	-	-	284,997
	31-Dec-18			
	< 1 tahun	1 - 2 tahun	> 2 tahun	Jumlah
Liabilitas				
Utang usaha	199,141	-	-	199,141
Biaya yg masih harus dibayar	130,855	-	-	130,855
Bank	-	-	-	-
Sewa pembiayaan	-	-	-	-
Utang lain-lain	0	-	-	0
Jumlah	329,996	-	-	329,996

Estimasi nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PSAK 60, "Instrumen Keuangan : Pengungkapan" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- (a) harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1)
- (b) input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1, yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2), dan
- (c) input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3)

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan Perseroan untuk aset keuangan adalah harga penawaran (bid price), sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (ask price). Instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- (a) penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis dan;
- (b) teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

Tabel berikut menyajikan jumlah tercatat dan estimasi nilai wajar dari instrumen keuangan pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 :

	31-Mar-19		31-Dec-18	
	Jumlah tercatat	Nilai wajar	Jumlah tercatat	Nilai wajar
Aset keuangan :				
Kas dan setara kas	1,137,001	1,137,001	1,403,521	1,403,521
Piutang usaha	8,988,622	8,988,622	5,856,848	5,856,848
Piutang retensi	-	-	-	-
Piutang lain-lain	2,806,565	2,806,565	2,806,565	2,806,565
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	6,286,710	6,286,710	8,036,710	8,036,710
Biaya dibayar di muka & uang muka	3,911,212	3,911,212	3,661,212	3,661,212
Pajak dibayar di muka	0	0	3,126	3,126
Jaminan pelaksanaan pekerjaan	2,513,494	2,513,494	2,513,494	2,513,494
Jumlah	25,643,604	25,643,604	24,281,476	24,281,476
Liabilitas keuangan :				
Utang usaha	199,141	199,141	199,141	199,141
Utang pajak	-	-	-	-
Utang lain-lain	-	-	0	0
Utang pihak berelasi	70,689,748	70,689,748	70,699,748	70,699,748
Utang sewa pembiayaan	-	-	-	-
Jumlah	70,888,889	70,888,889	70,898,889	70,898,889

Nilai wajar atas sebagian besar aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatat karena dampak pendiskontoan yang tidak signifikan.

Nilai wajar dari pinjaman jangka panjang dinilai menggunakan discounted cash flows berdasarkan suku bunga efektif terakhir yang berlaku untuk masing-masing pinjaman yang diutilisasi. Nilai wajar utang obligasi diestimasi menggunakan nilai kuotasi pasar terakhir.

35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Tidak ada peristiwa materiil yang perlu dilaporkan.

----- 000 -----